

**PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN
DALAM KEHAMILAN BAGI IBU DAN KELUARGA**

**"HEALTH EDUCATION ON REPRODUCTIVE HEALTH AND PREVENTION OF
VIOLENCE DURING PREGNANCY FOR MOTHERS AND FAMILIES"**

Dardin^{1*}, Dewi Hestiani K²

^{1*2}Akper Mappa Oudang, Makassar

^{1*}rhenu@ymail.com, ²deeheztyani@gmail.com

Article History:

Received: June 30th, 2025

Revised: August 10th, 2025

Published: August 15th, 2025

Keyword: reproductive health,
violence in pregnancy, forensic
nursing, pregnant women,
family

Abstract: Reproductive health during pregnancy is often affected by the risk of domestic violence, which negatively impacts both mothers and fetuses. Prevention and education are essential strategies, particularly by integrating maternal-child health and forensic nursing perspectives. The community service program was conducted on April 18, 2025, at the Wonomulyo Subdistrict Hall, Polewali Mandar Regency. Fifty participants (pregnant women, husbands, and families) attended the session, which applied interactive lectures, discussions, case studies, and educational leaflets. Participants showed high enthusiasm and improved understanding of reproductive health, pregnancy danger signs, and the impact of violence on mothers and fetuses. Interactive discussions highlighted the crucial role of husbands and families in preventing violence, as well as increased awareness of legal and health referral pathways. This activity aligns with global evidence recommending routine screening for intimate partner violence during pregnancy and family involvement in interventions. Integrating forensic nursing perspectives strengthened family preparedness, while regional policy support increased the potential for program replication. The educational intervention effectively improved reproductive health literacy and family capacity, and it has the potential to serve as a sustainable community-based model in West Sulawesi.

Abstrak

Kesehatan reproduksi ibu hamil sering dipengaruhi oleh risiko kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat berdampak buruk terhadap ibu dan janin. Pencegahan dan edukasi menjadi strategi penting, terutama dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan ibu-anak dan forensik keperawatan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 18 April 2025 di Aula Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 50 peserta (ibu hamil, suami, dan keluarga) mengikuti penyuluhan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan

pembagian leaflet edukasi. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, tanda bahaya kehamilan, serta dampak kekerasan terhadap ibu dan janin. Diskusi interaktif memperlihatkan kesadaran baru tentang pentingnya peran suami dan keluarga dalam pencegahan kekerasan, serta pemahaman jalur rujukan hukum dan kesehatan. Kegiatan ini selaras dengan bukti global yang merekomendasikan skrining kekerasan dalam kehamilan dan keterlibatan keluarga dalam intervensi. Integrasi aspek forensik keperawatan memperkuat kesiapsiagaan keluarga, sementara dukungan kebijakan daerah memperbesar peluang replikasi program. Penyuluhan efektif meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan kapasitas keluarga, serta dapat menjadi model intervensi komunitas berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Kesehatan Reproduksi, Kekerasan dalam Kehamilan, Forensik Keperawatan, Ibu Hamil, Keluarga

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial sepanjang kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Mutu layanan ibu—termasuk edukasi keluarga dan perlindungan dari kekerasan—menentukan keselamatan ibu-bayi serta kesejahteraan keluarga. Di banyak wilayah, hambatan pengetahuan, norma gender, dan akses layanan masih memperburuk risiko ibu hamil. Penyuluhan komprehensif yang menggabungkan promosi kesehatan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbukti strategis untuk mengisi kesenjangan tersebut, khususnya pada komunitas dengan dukungan sosial yang kuat. Kerangka intervensi memerlukan acuan global dan adaptasi lokal agar efektif dan berkelanjutan (World Health Organization, 2024).

Kekerasan pasangan intim selama kehamilan berkaitan dengan anemia, persalinan prematur, BBLR, depresi perinatal, hingga kematian ibu/janin. Estimasi prevalensi global kekerasan pasangan intim menunjukkan beban yang tinggi dan persistensi lintas kawasan, menegaskan kebutuhan intervensi edukatif yang melibatkan suami dan keluarga. Program yang menormalkan dukungan emosional, ekonomi, dan pengambilan keputusan bersama dapat menurunkan paparan risiko dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu. Dengan merujuk data global yang mutakhir, penyuluhan di tingkat kecamatan dapat menyasar determinan kultural dan struktural kekerasan (World Health Organization, 2021).

Di tingkat nasional, profil kesehatan terbaru menegaskan agenda percepatan penurunan kematian ibu dan peningkatan cakupan layanan kebidanan berkualitas. Pendekatan siklus hidup ibu serta penguatan layanan primer menjadi kunci, termasuk materi edukasi hak kesehatan reproduksi, tanda bahaya kehamilan, dan rujukan tepat waktu. Integrasi isu kekerasan berbasis gender (KBG) dalam layanan kesehatan ibu diperlukan karena dampaknya terhadap kepatuhan ANC, status gizi, dan kesejahteraan psikologis. Penyuluhan yang baik harus sejalan dengan indikator nasional berbasis bukti dan capaian lintas provinsi agar akuntabel (Kementrian Kesehatan, 2023)

Indonesia memperkuat kerangka hukum perlindungan korban melalui Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Di sektor layanan, pemerintah mengoperasikan SIMFONI-PPA untuk pencatatan dan analisis situasi KBG secara nasional dan daerah. Ketersediaan regulasi dan sistem data membuka ruang intervensi edukatif berbasis bukti di komunitas, termasuk kelas penyuluhan yang menautkan jalur rujukan pelayanan dan perlindungan. Penyuluhan di Wonomulyo perlu mengedepankan literasi hukum praktis agar keluarga tahu ke mana harus mengadu dan mencari layanan (Komnas Perempuan, 2023)

Urgensi lokal di Sulawesi Barat didukung kebijakan khusus berupa Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 2024–2026. Dokumen ini mengarahkan sinergi lintas sektor untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan, serta mendorong pemanfaatan data daerah. Sinkronisasi penyuluhan dengan RAD akan meningkatkan relevansi dan keberlanjutan, misalnya melalui jejaring Puskesmas, PKK, dan perangkat desa. Dengan landasan kebijakan ini, kelas penyuluhan di Wonomulyo dapat menjadi model intervensi yang selaras agenda provinsi, memperkuat rujukan dan pelaporan kasus berbasis komunitas (Pemda Sulawesi Barat, 2023)

Dinas Kesehatan Sulbar menekankan penguatan layanan primer dan kemitraan lintas sektor dalam dokumen perencanaan 2023–2026. Orientasi pada kesehatan ibu, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat menyediakan payung operasional bagi kegiatan penyuluhan yang kontekstual. Integrasi materi kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan ke dalam kegiatan posyandu/kelas ibu hamil mendorong keberlanjutan pasca-kegiatan. Renstra ini juga membuka peluang kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dan tokoh komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi (Dinkes Sulawesi Barat, 2024).

Pada tingkat kabupaten, data Satu Data Polman menunjukkan indikator korban perempuan yang terlayani dan rasio kekerasan per 100.000 penduduk perempuan pada 2023. Walau angka layanan mencerminkan upaya respons, keberadaan kasus tetap mengindikasikan kebutuhan pencegahan primer melalui edukasi keluarga. Penyuluhan di Aula Kecamatan Wonomulyo menargetkan ibu hamil, suami, dan keluarga sebagai aktor kunci perubahan norma dan perilaku. Pengetahuan hak reproduksi, mekanisme dukungan, dan akses rujukan diharapkan menurunkan kerentanan selama kehamilan (PP-PA Polman, 2023).

Instrumen data nasional lain—seperti Komnas Perempuan (CATAHU) dan pelaporan femisida oleh badan PBB—menggambarkan rumah tangga sebagai lokasi berisiko bagi perempuan. Edukasi berbasis keluarga menjadi elemen krusial agar tanda bahaya kekerasan dikenali dini dan mata rantai kekerasan terputus. Penyuluhan yang menggabungkan literasi kesehatan, komunikasi pasangan, dan jejaring bantuan meningkatkan kapasitas kolektif warga. Bukti global tentang femisida domestik memperkuat argumen bahwa intervensi komunitas bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak (Komnas Perempuan, 2023).

Pengalaman respons SRH–GBV di Indonesia selama periode darurat kesehatan menegaskan perlunya layanan yang ramah perempuan, lintas sektor, dan adaptif. UNFPA mencatat bahwa integrasi layanan kesehatan reproduksi dengan perlindungan GBV meningkatkan

kelangsungan layanan dan keselamatan perempuan. Dalam konteks Wonomulyo, model penyuluhan yang menautkan informasi klinis (ANC, tanda bahaya) dengan rute perlindungan (unit layanan, hotline, SIMFONI-PPA) akan memperkuat kesiapsiagaan keluarga. Materi harus praktis, sensitif budaya, dan mencakup peran suami serta mertua sebagai pendukung utama (UNFPA, 2021).

Selain aspek kekerasan, kualitas edukasi reproduksi memengaruhi perilaku kesehatan ibu, kepatuhan kunjungan ANC, dan pengambilan keputusan kontrasepsi pascapersalinan. Indonesia tengah memperbarui indikator melalui rangkaian SDKI 2023–2024, menyediakan data mutakhir untuk perencanaan lokal. Mengaitkan penyuluhan dengan indikator SDKI akan memudahkan evaluasi hasil (pengetahuan, sikap, praktik) dan advokasi di tingkat kebijakan daerah. Bagi Polman, penggunaan indikator nasional mempermudah perbandingan lintas kabupaten dan perbaikan program berbasis bukti (USAID, 2025).

Secara praktis, penyuluhan ini menargetkan tiga keluaran: (1) peningkatan literasi kesehatan reproduksi; (2) penguatan kapasitas keluarga mencegah, mengenali, dan merespons kekerasan selama kehamilan; (3) penguatan jalur rujukan lokal. Keluaran tersebut sejalan dengan prioritas Kemenkes untuk penguatan layanan primer dan dengan RAD Sulbar untuk perlindungan perempuan korban kekerasan. Sinergi akademisi–pemerintah daerah–tenaga kesehatan memastikan keberlanjutan program dan akuntabilitas hasil (Kementrian Kesehatan, 2022).

Dengan mempertimbangkan data Polman 2023 dan arah kebijakan Sulbar, pelaksanaan penyuluhan di Wonomulyo pada 18 April 2025 tepat dan mendesak. Momentum ini penting untuk memperkuat norma keluarga aman bagi ibu hamil, menekan dampak kesehatan akibat kekerasan, dan meningkatkan pemanfaatan layanan. Pendekatan berbasis bukti, sensitif budaya, dan terhubung ke sistem rujukan akan memperbesar peluang perubahan perilaku yang bertahan. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan replikasi pada kecamatan lain di Polman dan kabupaten sekitar

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan media edukasi yang mengintegrasikan perspektif kesehatan ibu-anak dan forensik keperawatan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah kekerasan pada kehamilan.

1. Metode Pelaksanaan

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 18 April 2025, di Aula Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

b. Peserta Kegiatan

Peserta terdiri atas :

- 1) Ibu hamil, suami/pendamping, dan keluarga.

- 2) Jumlah peserta $\pm$ 50 orang.
- 3) Rekrutmen dilakukan dengan koordinasi bersama Puskesmas, aparat kecamatan, dan kader PKK/Posyandu, untuk menjangkau keluarga yang berpotensi rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan kekerasan.

c. Pendekatan Kegiatan

Kegiatan mengintegrasikan dua perspektif utama :

- 1) Kesehatan Ibu dan Anak
 - a) Edukasi kesehatan reproduksi pada masa kehamilan.
 - b) Pengenalan tanda bahaya kehamilan dan pentingnya pemeriksaan antenatal care (ANC).
 - c) Peran keluarga dalam menjaga gizi, kesehatan mental, dan kesiapan persalinan.
- 2) Forensik Keperawatan
 - a) Pengenalan konsep kekerasan dalam kehamilan (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi).
 - b) Dampak medis dan psikologis kekerasan terhadap ibu dan janin.
 - c) Edukasi tentang identifikasi tanda-tanda kekerasan.
 - d) Informasi jalur perlindungan hukum dan mekanisme rujukan, termasuk layanan Puskesmas, Unit PPA Polres, serta SIMFONI-PPA.

d. Metode Penyuluhan

- 1) Ceramah Interaktif
Materi disampaikan oleh dosen pelaksana dengan menekankan keterkaitan antara kesehatan ibu hamil dan aspek perlindungan forensik.
- 2) Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat berbagi pengalaman, kendala, atau kasus yang pernah terjadi, kemudian didiskusikan secara solutif.
- 3) Studi Kasus Singkat
Penyajian contoh kasus kekerasan pada ibu hamil (tanpa menyebut identitas) untuk meningkatkan kesadaran peserta mengenai tanda-tanda dan dampaknya.
- 4) Leaflet Edukasi
Berisi informasi kesehatan kehamilan, pencegahan kekerasan, dan jalur perlindungan hukum.

e. Media dan Alat Bantu

- 1) Proyektor, slide presentasi, dan video edukasi singkat.
- 2) Leaflet edukasi.
- 3) Sound system.
- 4) Dokumentasi foto kegiatan.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi singkat dengan pertanyaan lisan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta.
- b. Catatan tindak lanjut berupa rencana advokasi bersama Puskesmas dan perangkat desa.

- c. Rekomendasi agar peserta menjadi agen penyebar informasi di keluarga dan komunitas.

HASIL

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada 18 April 2025 di Aula Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dihadiri oleh sekitar 50 peserta, terdiri atas ibu hamil, suami/pendamping, dan anggota keluarga. Kehadiran peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi sekaligus kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan dalam kehamilan.

1. Partisipasi Peserta

Peserta hadir tepat waktu, aktif mengikuti jalannya acara, dan terlibat dalam sesi diskusi. Mayoritas ibu hamil menyampaikan bahwa mereka jarang memperoleh informasi spesifik tentang keterkaitan kesehatan reproduksi dengan isu kekerasan. Kehadiran suami dan keluarga memperlihatkan dukungan nyata dalam menciptakan lingkungan aman bagi ibu hamil.

2. Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan mencakup:

- a. Kesehatan reproduksi ibu hamil: pentingnya pemeriksaan ANC, tanda bahaya kehamilan, kebutuhan gizi, serta kesehatan mental.
- b. Dampak kekerasan dalam kehamilan terhadap ibu dan janin, termasuk risiko medis (perdarahan, prematuritas, BBLR) dan psikologis (stres, depresi).
- c. Perspektif forensik keperawatan: bagaimana mengidentifikasi tanda kekerasan, langkah pencatatan medis, serta jalur rujukan hukum dan kesehatan.
- d. Peran keluarga, khususnya suami, dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan mencegah kekerasan domestik.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi berlangsung dinamis, dengan sejumlah pertanyaan muncul, seperti :

- a. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda kekerasan psikis pada ibu hamil?
- b. Apa langkah awal keluarga jika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Apakah layanan hukum dan kesehatan dapat diakses secara gratis oleh korban?
- d. Tim pelaksana menjawab pertanyaan dengan pendekatan praktis, menghubungkan teori kesehatan ibu dengan aspek forensik keperawatan.

4. Studi Kasus

Salah satu studi kasus sederhana yang dipaparkan menggambarkan seorang ibu hamil yang mengalami kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi. Peserta diajak menganalisis dampak kasus tersebut terhadap kesehatan ibu-janin dan bagaimana keluarga serta tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi awal. Metode ini berhasil membuka wawasan peserta mengenai pentingnya deteksi dini kekerasan dalam kehamilan.

5. Evaluasi Sederhana

Evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi lisan di akhir kegiatan, sebagian besar peserta mengaku pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi meningkat, khususnya terkait dampak kekerasan terhadap ibu hamil. Peserta juga menyatakan lebih memahami jalur perlindungan hukum dan kesehatan yang tersedia di wilayah Polewali Mandar.

6. Dampak Langsung

- a. Peningkatan kesadaran keluarga bahwa kesehatan ibu tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga aspek perlindungan dan keadilan.
- b. Tumbuhnya kesepahaman antara ibu hamil dan keluarga tentang peran suami/pendamping dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan.
- c. Tersedianya media edukasi praktis yang dapat menjadi rujukan di rumah.



Gambar 1. Penyampaian Materi Edukasi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dipimpin Moderator



Gambar 2. Sesi Foto Bersama Pemateri, LP2M, Staf Akper Mappa Oudang dan Stakeholder

PEMBAHASAN

Hasil penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Wonomulyo memperlihatkan antusiasme peserta, baik ibu hamil maupun keluarga, dalam menerima materi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan pada kehamilan. Tingginya partisipasi dan keterlibatan dalam diskusi menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang berhasil diisi melalui kegiatan ini. Hal ini sejalan dengan bukti global yang menegaskan bahwa kekerasan pasangan intim selama kehamilan berdampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan janin, mulai dari risiko perdarahan, prematuritas, bayi berat lahir rendah, hingga kematian janin (WHO, 2021). Dengan demikian, penggabungan perspektif kesehatan ibu-anak (KIA) dan forensik keperawatan menjadi pendekatan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Materi yang diberikan selaras dengan pedoman klinis internasional. USPSTF (2025) merekomendasikan skrining kekerasan pasangan intim secara rutin pada perempuan usia reproduktif, termasuk ibu hamil, sedangkan ACOG menyarankan skrining pada kunjungan awal, setiap trimester, dan masa nifas. Dengan memasukkan aspek pencegahan dan deteksi kekerasan dalam penyuluhan, kegiatan ini secara langsung mendukung standar pelayanan antenatal yang komprehensif (ACOG, 2021; USPSTF, 2025). Integrasi ini memperlihatkan relevansi akademisi untuk menjembatani kebijakan global ke dalam konteks lokal.

Keterlibatan suami dan keluarga dalam diskusi terbukti penting. Penelitian terkini menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis pasangan mampu menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga pada masa kehamilan, sedangkan meta-analisis menegaskan efektivitas program berbasis komunitas dalam mengurangi risiko kekerasan hingga satu tahun setelah intervensi (Cluver et al., 2023; Meiksin et al., 2021). Temuan lapangan bahwa keluarga aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman semakin menguatkan bukti bahwa keberhasilan pencegahan kekerasan sangat bergantung pada dukungan sosial terdekat.

Selain itu, perspektif forensik keperawatan memberikan nilai tambah yang signifikan. Edukasi mengenai cara mengenali tanda kekerasan, teknik pencatatan medis sederhana, serta informasi jalur rujukan hukum menegaskan peran perawat forensik dalam melindungi hak-hak ibu hamil. Hal ini sejalan dengan standar praktik internasional yang menekankan kompetensi dokumentasi, pengamanan bukti, serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi pelayanan yang aman dan akuntabel (Campbell & Harville, 2020; IAFN, 2021). Dengan memasukkan unsur forensik, penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan keluarga dalam melindungi korban.

Penguatan aspek kebijakan juga tampak dalam kegiatan ini. Penyuluhan mengaitkan materi dengan sistem pelaporan nasional melalui SIMFONI-PPA, yang telah menjadi instrumen pemerintah dalam mencatat dan menganalisis kasus kekerasan. Penyediaan informasi kontak layanan Puskesmas, Unit PPA, dan jalur hukum memberikan kejelasan praktis bagi keluarga ketika menghadapi situasi darurat. Bukti dari UNFPA (2021) menunjukkan bahwa integrasi layanan kesehatan reproduksi dengan perlindungan gender-based violence memperkuat kesinambungan

layanan, terutama pada situasi darurat kesehatan. Model ini sangat relevan direplikasi dalam pelayanan primer di Kabupaten Polewali Mandar.

Dari perspektif regional, hasil kegiatan ini mendukung arah kebijakan Sulawesi Barat melalui Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 2024–2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Sulbar 2023–2026. Kedua dokumen tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan layanan primer, serta pemberdayaan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu (JDIH Sulbar, 2023; Dinas Kesehatan Sulbar, 2023). Kegiatan ini juga relevan dengan kondisi Kabupaten Polewali Mandar, di mana data Satu Data Polman 2023 masih mencatat adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan upaya pencegahan primer.

Dampak potensial dari kegiatan ini terlihat pada peningkatan kesadaran peserta bahwa kesehatan ibu hamil tidak dapat dipisahkan dari aspek perlindungan dan keadilan. Dengan meningkatnya literasi keluarga mengenai jalur perlindungan hukum dan kesehatan, diharapkan terjadi peningkatan perilaku mencari pertolongan dini, kepatuhan kunjungan antenatal, serta pengurangan risiko komplikasi akibat kekerasan. Hal ini sejalan dengan temuan observasional dan tinjauan sistematis yang menunjukkan hubungan erat antara paparan kekerasan dan luaran buruk ibu-janin (James et al., 2022).

Kekuatan dari program ini terletak pada pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis bukti. Kombinasi KIA dan forensik keperawatan menghasilkan spektrum edukasi yang menyeluruh, dari promosi kesehatan hingga perlindungan hukum. Diskusi dan studi kasus memungkinkan adaptasi dengan konteks budaya lokal, sementara leaflet berisi informasi praktis menjadi jembatan nyata ke sistem rujukan. Temuan ini konsisten dengan rekomendasi intervensi komunitas multikomponen yang efektif dalam mencegah kekerasan dan memperbaiki akses layanan (Meiksin et al., 2021).

Meski demikian, keterbatasan kegiatan ini adalah sifatnya yang hanya satu kali pertemuan dan belum dilengkapi instrumen evaluasi terstandar seperti pre-test dan post-test. Pengukuran peningkatan pengetahuan hanya dilakukan secara lisan, dan tidak ada tindak lanjut untuk memantau perubahan perilaku maupun akses layanan dalam jangka menengah. Untuk memperkuat efektivitas, penyuluhan berikutnya disarankan menggunakan kuesioner tervalidasi, melaksanakan tindak lanjut pasca-3–6 bulan, serta mengintegrasikan skrining sederhana kekerasan pada kelas ibu hamil sebagaimana dianjurkan pedoman klinis (USPSTF, 2025).

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penggabungan kesehatan ibu-anak dan forensik keperawatan dalam penyuluhan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dengan dukungan kebijakan daerah dan jejaring layanan nasional, kegiatan ini dapat direplikasi pada kecamatan lain di Polewali Mandar dan wilayah Sulawesi Barat. Intervensi semacam ini memiliki potensi signifikan untuk menekan angka kekerasan dalam kehamilan, meningkatkan kualitas kesehatan ibu, serta memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Akper Mappa Oudang Makassar di Aula Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada 18 April 2025 berhasil meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga mengenai kesehatan reproduksi serta pencegahan kekerasan dalam kehamilan. Antusiasme dan keterlibatan aktif peserta menunjukkan adanya kebutuhan tinggi terhadap edukasi komprehensif yang menggabungkan perspektif kesehatan ibu-anak dan forensik keperawatan.

Penyampaian materi melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan media leaflet terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran tentang dampak kekerasan pada kesehatan ibu dan janin, serta memberikan informasi praktis mengenai jalur perlindungan hukum dan layanan kesehatan. Integrasi aspek kesehatan reproduksi dan forensik keperawatan dalam penyuluhan memperkuat kapasitas keluarga untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, mengambil langkah pencegahan, serta mencari rujukan yang tepat.

Dengan dukungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan primer kekerasan terhadap ibu hamil di Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, penyuluhan ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan keluarga, sekaligus memperkuat perlindungan sosial-hukum bagi perempuan selama masa kehamilan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Direktur Akper Mappa Oudang Makassar, Ketua LP2M Akper Mappa Oudang Makassar, Pemerintah Kecamatan Wonomulyo, Pemerintah Kab. Polewali Mandar dan segenap stakeholder.

DAFTAR REFERENSI

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Screening for intimate partner violence, sexual violence, and reproductive coercion. Committee Opinion No. 825. *Obstetrics & Gynecology*, 137(6), e63–e71. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004408>
- Campbell, J. C., & Harville, E. W. (2020). Nursing responses to intimate partner violence during pregnancy. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 45(3), 140–147. <https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000611>
- Cluver, L., Meinck, F., Toska, E., Orkin, M., Campeau, L., & Sherr, L. (2023). Reducing intimate partner violence in low- and middle-income countries: Evidence from cluster randomised

- trials of parenting and couple interventions. *The Lancet Global Health*, 11(4), e570–e581. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00023-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00023-1)
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023–2026. Mamuju: Dinkes Sulbar. <https://dinkes.sulbarprov.go.id>
- International Association of Forensic Nurses (IAFN). (2021). Intimate Partner Violence Nurse Examiner Education Guidelines. IAFN. <https://www.forensicnurses.org/page/IPVGuidelines>
- James, L., Brody, D., & Hamilton, Z. (2022). Intimate partner violence and adverse maternal and neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 487. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04831-4>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2024–2026. <https://jdih.sulbarprov.go.id>
- Kementerian Kesehatan. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023.
- Komnas Perempuan. (2022). CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Meiksin, R., Meekers, D., & Henley, J. (2021). Community-based interventions to prevent intimate partner violence during pregnancy: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(5), 1125–1138. <https://doi.org/10.1177/1524838019897343>
- Nur, A. H., Putra, L. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>
- Satu Data Kabupaten Polewali Mandar. (2024). Statistik Gender dan Anak 2023. Polewali Mandar: Bappeda Polman. <https://data.polmankab.go.id>
- UNFPA Indonesia. (2021). Lessons Learned: SRH and GBV Response to COVID-19 in Indonesia (June 2020–June 2021). UNFPA Indonesia. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/lesson_learned_covid-19_fin9feb.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & UN Women. (2024). Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide): Global estimates 2022. Vienna:

UNODC. <https://www.unodc.org>

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). (2025). Screening for intimate partner violence, elder abuse, and abuse of vulnerable adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 333(3), 221–228. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.29517>

World Health Organization (WHO). (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

World Health Organization (WHO). (2024). Global report on sexual and reproductive health and rights. Geneva: WHO. <https://www.who.int>

World Health Organization (WHO). (2025). Maternal health. *WHO*, 5(May), 1–47. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0022863X.bib>